

Setelah Kompak Membantah, Akhirnya Pihak Kejaksaan Akui Kajari Tuban Jalani Pemeriksaan



kabartuban.com - Misteri pergantian mendadak pucuk pimpinan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban akhirnya mulai terjawab. Setelah memicu berbagai spekulasi di tengah mencuatnya isu dugaan rasuah dalam penanganan perkara tambang, Kejari Tuban memberikan penjelasan resmi terkait penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri Tuban.

Sebelumnya, jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tuban yang diemban Supardi mendadak digantikan oleh Abdul Rasyid sebagai Pelaksana Harian (Plh). Pergantian tersebut terjadi secara mendadak dan memunculkan beragam pertanyaan di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejari Tuban, Stephan Dian Palma,

membenarkan adanya pemeriksaan internal terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Kejari Tuban.

“Kami mengklarifikasi pemberitaan yang berkembang belakangan ini. Pada hari Minggu lalu, Kajari dan Kasi Pidum Tuban diduga melakukan tindakan indisipliner dalam pelaksanaan tugas. Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan oleh bidang Pengawasan. Untuk mempermudah proses pemeriksaan, sementara pelaksanaan tugas Kepala Kejaksaan Negeri Tuban dijalankan oleh Pelaksana Harian,” ujar Stephan.

Meski demikian, pihak Kejari Tuban belum menjelaskan secara rinci bentuk dugaan pelanggaran disiplin yang tengah diperiksa

maupun sejauh mana proses pemeriksaan telah berjalan.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Kabartuban.com, pemeriksaan internal tersebut diduga berkaitan dengan dugaan permintaan uang pelicin dalam penanganan salah satu perkara tambang yang ditangani Kejari Tuban.

Dalam informasi yang beredar, sejumlah pejabat disebut turut menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Mereka di antaranya Kajari Tuban Supardi, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Akhmad Akhsan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Ubab Shohibul Mahali yang....

[Baca Selengkapnya....](#)



Habiskan Anggaran Rp13,5 Miliar, Gedung Baru PN Tuban Terbengkalai Lima Tahun

kabartuban.com - Dari kejauhan, bangunan dua lantai bercat putih itu masih tampak megah berdiri di kawasan Mall Pelayanan Publik (MPP) Tuban, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Namun, kemegahan itu hanya menyisakan ironi. Hampir lima tahun sejak rampung dibangun dengan anggaran Rp13,5 miliar, gedung baru Pengadilan Negeri (PN) Tuban belum pernah digunakan untuk melayani masyarakat.

Alih-alih menjadi wajah baru pelayanan hukum di Kabupaten Tuban, bangunan yang didanai dari APBD tahun 2021 tersebut justru mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan sebelum sempat difungsikan.

Pantauan di lokasi pada Kamis (2/7/2026) memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Halaman gedung dipenuhi semak belukar, sejumlah kaca bangunan terlihat ada yang retak, sementara beberapa bagian plafon mulai ambrol.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik mengenai nasib aset bernilai miliaran rupiah yang hingga kini belum memiliki kepastian operasional.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, mengakui hingga saat ini pemerintah daerah belum dapat memastikan kapan gedung tersebut akan mulai dimanfaatkan. Menurutnya, proses komunikasi dengan Pengadilan Negeri Tuban dan Mahkamah Agung masih terus dilakukan.

“Komunikasinya dengan PN dan Mahkamah Agung (MA) terus dimaksimalkan,” ujar Lindra usai mengikuti rapat paripurna DPRD Tuban, Rabu (1/7/2026).

Lindra menjelaskan, status kepemilikan aset tersebut masih berada di tangan Pemerintah Kabupaten Tuban. Ia berharap seluruh persoalan

[Baca Selengkapnya....](#)

Dua Sekolah Ambruk Jelang Tahun Ajaran Baru, Pemkab Tuban Siapkan Perbaikan



kabartuban.com - Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, persoalan infrastruktur sekolah di Kabupaten Tuban kembali menjadi perhatian publik. Di saat ribuan siswa bersiap memasuki ruang kelas, dua bangunan sekolah justru ambruk dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan sarana pendidikan sekaligus efektivitas pemeliharaan bangunan sekolah di Bumi Wali.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tuban per 1 Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Tuban tetap mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk rehabilitasi sedang hingga berat sejumlah sekolah dasar.

Beberapa proyek yang telah tercantum di antaranya rehabilitasi UPT SD Negeri Waleran 1 Kecamatan Grabagan dengan pagu anggaran Rp264,9 juta, UPT SD Negeri Sidorejo 2 Kecamatan Tuban

sebesar Rp239 juta, UPT SD Negeri Banyubang Kecamatan Grabagan senilai Rp239 juta, serta UPT SD Negeri Mlangi 1 Kecamatan Widang dengan nilai mencapai Rp312 juta.

Di tengah upaya rehabilitasi tersebut, publik masih dihadapkan pada rentetan insiden robohnya bangunan sekolah. Peristiwa pertama terjadi di SD Negeri Kutorejo 3 pada 3 Juni 2026. Selang beberapa pekan kemudian, atap bangunan SD Negeri Trantang di Kecamatan Kerek juga ambruk pada 20 Juni 2026.

Dua kejadian itu memicu sorotan masyarakat. Pasalnya, keamanan bangunan sekolah menjadi kebutuhan mendasar, terlebih ketika kegiatan belajar mengajar akan kembali berlangsung dalam waktu dekat.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menilai penyebab

utama ambruknya bangunan lebih banyak dipengaruhi faktor alam, khususnya kondisi tanah yang labil.

“Rata-rata tanahnya labil. Biasanya diawali tanah yang sudah bergerak, kemudian di seberangnya terdapat sungai kecil sehingga terjadi penggerusan tanah,” ujar Lindra usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Tuban, Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan, selain faktor tanah, usia bangunan juga menjadi salah satu penyebab kerusakan pada sejumlah sekolah.

Saat ditanya mengenai apakah kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan pembangunan maupun mitigasi risiko, Lindra menilai perubahan kondisi alam sulit diprediksi sejak tahap perencanaan....

[Baca Selengkapnya....](#)

Balita di Tuban Diduga Dicabuli Tetangga di Dalam Rumah Saat Kejar Helikopter



kabartuban.com - Nuansa sore yang tenang di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, mendadak berubah menjadi kepanikan pada Kamis (25/6/2026) lalu. Seorang balita perempuan berusia 3 tahun 7 bulan, sebut saja Bunga, menjadi korban dugaan pencabulan oleh tetangganya sendiri, KS (58), setelah korban terpisah dari pengawasan orang tuanya karena asyik mengejar helikopter.

Peristiwa pilu ini bermula sekitar pukul 16.50 WIB. Sore itu, Bunga sedang asyik bermain di depan rumahnya. Ketika mendengar suara gemuruh helikopter di udara,

dengan kepolosan khas anak-anak, ia berlari ke arah utara untuk menyaksikannya. Namun, keceriaan itu berubah menjadi petaka ketika langkah kecilnya membawanya ke depan rumah pelaku.

Ibu korban, E.A. (21), yang menyadari buah hatinya tiba-tiba menghilang, langsung didekahi kepanikan. Ia sempat berkeliling kampung menggunakan sepeda motor, mengetuk pintu demi pintu tetangga, namun hasilnya nihil.

Titik terang baru muncul ketika ibu korban meminta bantuan warga untuk memeriksa

rekaman CCTV di sekitar lokasi. Bak disambar petir di siang bolong, rekaman kamera pengawas menunjukkan momen terakhir Bunga melangkah masuk ke dalam rumah KS.

Kecurigaan menguat saat ibu korban bersama saksi mendatangi rumah KS. Seluruh akses masuk, baik pintu depan maupun belakang, dalam kondisi terkunci rapat dari dalam. Di tengah kepanikan yang memuncak, samar-samar terdengar suara tangisan Bunga dari dalam rumah yang gelap itu.

Warga yang mulai berdatangan kemudian menggedor-gedor

pintu secara paksa. Sadar aksinya tepergok, KS mencoba melarikan diri dengan mengeluarkan korban melalui pintu belakang. Padasaat ditemukan warga, kondisi bunga sangat memprihatinkan, ia menangis dengan kondisi celana yang terpasang terbalik.

Massa yang telanjur emosi segera mengepung rumah pelaku. Di hadapan warga yang geram, KS akhirnya mengakui perbuatan bejatnya yang telah mencium pipi dan melorotkan celana balita malang tersebut. Tak terima dengan....

[Baca Selengkapnya....](#)



Lima Jabatan Eselon II Pemkab Tuban Masih Kosong, Tiga Kepala OPD Segera Pensiun

kabartuban.com – Memasuki pertengahan tahun 2026, roda birokrasi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban masih diwarnai kekosongan sejumlah jabatan strategis. Sedikitnya lima posisi pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) hingga kini belum terisi pejabat definitif dan masih dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Kondisi tersebut menjadi sorotan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Tuban dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi pada, Selasa (30/7/2026).

Dalam pandangan umum Fraksi PKB yang dibacakan juru bicaranya, Sumartono, kekosongan jabatan strategis dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya,

keberadaan Plt memang diperbolehkan sebagai solusi sementara, namun tidak bisa menjadi pengganti permanen pejabat definitif. Fraksi PKB menilai, jabatan definitif memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengambil keputusan strategis, menyusun kebijakan, hingga mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Sebaliknya, jika terlalu banyak organisasi perangkat daerah (OPD) dipimpin Plt, dikhawatirkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan ikut terdampak.

“Pelayanan publik akan lebih optimal dan akselerasi pembangunan dapat berjalan lebih cepat apabila setiap OPD dipimpin pejabat definitif,” ujar Sumartono dalam rapat paripurna.

Saat ini terdapat lima jabatan Eselon II di lingkungan Pemkab Tuban yang masih dijabat oleh Plt, yakni Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Inspektur Kabupaten,

Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).

Selain itu, jabatan Direktur RSUD dr. Koesma Tuban yang merupakan Badan usaha milik daerah (BUMD) juga masih dipimpin oleh pelaksana tugas.

Kekosongan jabatan tersebut diperkirakan masih akan bertambah. Pasalnya, dalam tahun 2026 sedikitnya tiga pejabat Eselon II dijadwalkan memasuki masa purna tugas. Mereka berasal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP).

Jika proses pengisian jabatan tidak segera dilakukan, jumlah OPD yang dipimpin Plt berpotensi semakin....

[Baca Selengkapnya....](#)



Berawal dari Takut Air, Siswi SD Asal Tuban Kini Wakili Jatim di O2SN Nasional

kabartuban.com – Tidak ada yang menyangka, keputusan sederhana sepasang orang tua memasukkan putrinya ke klub renang agar tidak lagi takut air justru menjadi awal lahirnya seorang atlet berprestasi.

Adalah Salwa Kaysa Adnafika (11), siswi kelas IV UPT SDN Tasikmadu 1, Kabupaten Tuban, yang kini berhasil mengharumkan nama daerah kabupaten Tuban setelah meraih Juara I Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) cabang renang putri tingkat Provinsi Jawa Timur. Gelar tersebut sekaligus mengantarkannya menjadi wakil Jawa Timur pada O2SN tingkat nasional.

Prestasi itu diraih Salwa dalam ajang

O2SN SD yang berlangsung di Kolam Renang GOR Delta Sidoarjo, Selasa (30/6/2026). Atlet binaan Megalodon Aquatic Club Tuban (MACT) tersebut berhasil mengungguli peserta terbaik dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Namun, medali yang kini tergantung di lehernya bukanlah akhir dari sebuah perlombaan, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang dimulai dari ketakutan seorang anak terhadap air.

Sang ayah, Rusmiyadi, mengenang bahwa awalnya ia dan istrinya, Yani, sama sekali tidak memiliki target....

[Baca Selengkapnya...](#)